

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

PROVINSI SUMATERA SELATAN
MENURUT PENGELUARAN

2019-2023

Volume 10, 2024

<https://sumsel.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

PROVINSI SUMATERA SELATAN
MENURUT PENGELUARAN

2019-2023

Volume 10, 2024



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI SUMATERA SELATAN
MENURUT PENGELUARAN 2019–2023**

Volume 10, 2024

Katalog: 9302020.16

ISSN: 2503-1961

Nomor Publikasi: 16000.24005

Ukuran Buku: 20 cm x 26 cm

Jumlah Halaman: xiv+88 halaman

Penyusun Naskah:

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Pembuat Kover:

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Penerbit:

©Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Dicetak Oleh:

CV. Rafa Cipta Media

Sumber Ilustrasi:

canva.com

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

TIM PENYUSUN

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI SUMATERA SELATAN
MENURUT PENGELUARAN 2019–2023**
Volume 10, 2024

Pengarah:

Moh Wahyu Yulianto

Penanggungjawab:

Tri Ratna Dewi, S.Si, MM

Penyunting:

Etty Melia Nurty, S.ST, M.Si

Penulis Naskah:

Rizki Handayani, S.ST, M.Si

Pengolah Data :

Rizki Handayani, S.ST, M.Si

Penata Letak:

Arie Almiyati, SE, M.M

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Namun, perangkat data ini juga dapat digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, diantaranya sebagai dasar pengembangan model ekonomi dalam rangka menyusun kebijakan, tingkat peredaran uang, penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

PDRB menurut pengeluaran menjelaskan tentang besaran nilai produk atau barang dan jasa yang digunakan sebagai konsumsi akhir masyarakat, yang direalisasikan dalam bentuk pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga, pengeluaran konsumsi akhir Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR), pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori serta net ekspor barang dan jasa.

Publikasi **“Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Selatan Menurut Pengeluaran 2019-2023”** menyajikan data dan informasi tentang pendekatan PDRB dari sisi pengeluaran untuk periode 2019-2023 yang didasarkan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan 2010 (ADHK).

Apresiasi dan terima kasih disampaikan pada berbagai pihak yang telah mendukung penerbitan publikasi ini. Saran dan masukan sangat diharapkan agar publikasi ini dapat disajikan lebih baik di masa yang akan datang. Semoga publikasi bermanfaat bagi pengguna.

Palembang, April 2024
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sumatera Selatan,



Moh Wahyu Yulianto

DAFTAR ISI

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI SUMATERA SELATAN
MENURUT PENGELUARAN 2019–2023**

Volume 10, 2024

Halaman

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Grafik	xi
Daftar Lampiran	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	3
1.2 Manfaat Statistik PDRB	4
BAB II METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA	7
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga	9
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT	13
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah	16
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	19
2.5 Perubahan Inventori	24
2.6 Ekspor dan Impor	25
BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN PROVINSI SUMATERA SELATAN BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN TAHUN 2019–2023	31
3.1 Tinjauan Agregat PDRB Provinsi Sumatera Selatan Menurut Pengeluaran	34
3.2 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga	39
3.3 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT	45
3.4 Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah	46
3.5 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	51
3.6 Perkembangan Perubahan Inventori	53
3.7 Perkembangan Net Ekspor Barang dan Jasa	54

BAB IV	PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB PROVINSI SUMATERA	
	SELATAN MENURUT PENGELUARAN, 2019–2023	59
4.1	PDRB (Nominal)	61
4.2	Perbandingan Penggunaan PDRB untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor	62
4.3	Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	63
4.4	Perbandingan Konsumsi Akhir terhadap PDRB	64
4.5	Perbandingan Ekspor terhadap PMTB	65
4.6	Perbandingan PDRB terhadap Impor	65
4.7	Keseimbangan Total Penyediaan dan Total Permintaan	66
4.8	Neraca Perdagangan (<i>Trade Balance</i>)	68
4.9	Rasio Perdagangan Internasional (RPI)	70
4.10	Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	70
BAB V	PENUTUP	73
LAMPIRAN		77
DAFTAR PUSTAKA		85

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3.1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Provinsi Sumatera Selatan Menurut Pengeluaran (miliar rupiah), 2019–2023	34
Tabel 3.2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Sumatera Selatan Menurut Pengeluaran (miliar rupiah), 2019–2023	35
Tabel 3.3	Distribusi PDRB ADHB Provinsi Sumatera Selatan Menurut Pengeluaran (persen), 2019–2023	36
Tabel 3.4	Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Provinsi Sumatera Selatan Menurut Pengeluaran (persen), 2019–2023	37
Tabel 3.5	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Sumatera Selatan, 2019–2023	39
Tabel 3.6	Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Sumatera Selatan (persen), 2019–2023	41
Tabel 3.7	Pertumbuhan Rril Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Sumatera Selatan (persen), 2019–2023	42
Tabel 3.8	Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Sumatera Selatan (persen), 2019–2023	44
Tabel 3.9	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi LNPRT Provinsi Sumatera Selatan, 2019–2023	45
Tabel 3.10	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, 2019–2023.....	47
Tabel 3.11	Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, 2019–2023	49
Tabel 3.12	Perkembangan dan Struktur PMTB Provinsi Sumatera Selatan, 2019–2023	52
Tabel 3.13	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Provinsi Sumatera Selatan, 2019–2023	54

Tabel 3.14	Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Selatan, 2019–2023	55
Tabel 3.15	Perkembangan Impor Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Selatan, 2019–2023	57
Tabel 4.1	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Provinsi Sumatera Selatan, 2019–2023	61
Tabel 4.2	Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor, 2019–2023	63
Tabel 4.3	Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB, 2019–2023	63
Tabel 4.4	Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Provinsi Sumatera Selatan, 2019–2023	64
Tabel 4.5	Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB), 2019–2023	65
Tabel 4.6	Rasio PDRB terhadap Impor Provinsi Sumatera Selatan, 2019–2023	66
Tabel 4.7	Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Provinsi Sumatera Selatan, 2019–2023	67
Tabel 4.8	Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Luar Negeri, Provinsi Sumatera Selatan, 2019–2023	68
Tabel 4.9	Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Antar Provinsi, Provinsi Sumatera Selatan, 2019–2023	69
Tabel 4.10	Rasio Perdagangan Internasional Provinsi Sumatera Selatan, 2019–2023	70
Tabel 4.11	Incremental Capital Output Ratio Provinsi Sumatera Selatan, 2019–2023	71

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Gambar 3.1	Perbandingan PDRB ADHB dan ADHK 2010 Provinsi Sumatera Selatan Menurut Pengeluaran (miliar rupiah), 2019–2023	36
Gambar 3.2	Indeks Implisit PDRB Provinsi Sumatera Selatan Menurut Pengeluaran (persen), 2019–2023	38

<https://sumsel.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Sumatera Selatan Menurut Pengeluaran (miliar rupiah), 2019–2023	79
Lampiran 2	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Sumatera Selatan Menurut Pengeluaran (miliar rupiah), 2019–2023	80
Lampiran 3	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Sumatera Selatan Menurut Pengeluaran (persen), 2019–2023	81
Lampiran 4	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Sumatera Selatan Menurut Pengeluaran (persen), 2019–2023	82
Lampiran 5	Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010 = 100) Provinsi Sumatera Selatan Menurut Pengeluaran (persen), 2019–2023	83
Lampiran 6	Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Provinsi Sumatera Selatan Menurut Pengeluaran (persen), 2019–2023	84

BAB I

PENDAHULUAN

<https://sumsel.bps.go.id>



1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/ regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 dan ini tentu akan mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

a. Menurut Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: (1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; (2) Pertambangan dan Penggalian; (3) Industri Pengolahan; (4) Pengadaan Listrik dan Gas; (5) Pengadaan Air Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; (6) Konstruksi; (7) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; (8) Transportasi dan Pergudangan; (9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; (10) Informasi dan Komunikasi; (11) Jasa Keuangan dan Asuransi; (12) Real Estate; (13) Jasa

Perusahaan; (14) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; (15) Jasa Pendidikan; (16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan (17) Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

b. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak lainnya atas produksi neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

c. Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga; (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga; (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah; (4) pembentukan modal tetap bruto; (5) perubahan inventori dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak lainnya atas produksi neto.

1.2 MANFAAT STATISTIK PDRB

Data PDRB adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian regional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap lapangan usaha dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap lapangan usaha dalam suatu wilayah. Lapangan usaha yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.
4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa yang digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri/daerah.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan luar negeri/daerah.
7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

BAB II

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

<https://sumsel.bps.go.id>



2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

I. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

II. Konsep dan Definisi

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) adalah pengeluaran akhir atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

III. Cakupan

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh penduduk suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu region. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (United Nations), yaitu sebagai berikut:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol dan tembakau
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furnitur, perlengkapan rumah tangga dan perbaikan rutin rumah
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan

10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan akomodasi
12. Barang dan jasa lainnya

Namun karena keterbatasan data, maka 12 COICOP tersebut dikelompokkan kembali menjadi hanya 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mencakup juga hal-hal sebagai berikut :

1. Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*)
Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).
2. Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri.
3. Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain.
4. Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen di luar wilayah atau di luar negeri (diperlakukan sebagai impor).

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

1. Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut).
2. Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
3. Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.
4. Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

IV. Penghitungan PKRT Tahunan

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah :

- a. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- b. Hasil Survei Ekonomi Rumah Tangga Triwulanan (Seruti), dalam bentuk pengeluaran konsumsi makanan dan non makanan setiap triwulan,
- c. Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- d. Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dan jenis pengeluaran tertentu,
- e. Indeks Harga Konsumen (IHK).

2. Metode penghitungan

Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Susenas dan Seruti. Akan

tetapi, karena hasil estimasi data pengeluaran rumah tangga yang berasal dari Susenas cenderung *underestimate* (terutama untuk kelompok bukan makanan dan kelompok makanan jadi), maka perlu dilakukan penyesuaian (*adjustment*). Dalam melakukan *adjustment*, digunakan data sekunder dalam bentuk data atau indikator *supply* dari berbagai sumber data di luar Susenas. Setelah diperoleh hasil *adjustment*, maka yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan pada data sekunder. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu. Hal ini dilakukan karena hasil penghitungan dari data sekunder dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara men-*deflate* PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010. Untuk lebih jelasnya, langkah-langkah penghitungan PKRT dapat diringkas sbb:

1. Estimasi PKRT hasil Susenas:
 - a. Makanan = pengeluaran konsumsi perkapita seminggu x $(30/7) \times 12 \times$ jumlah penduduk pertengahan tahun
 - b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi perkapita sebulan x $12 \times$ jumlah penduduk pertengahan tahun
2. Data poin ke-1 dikelompokkan menjadi 7 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas yang mungkin dikontrol secara tersendiri;
3. Terhadap data poin ke-2 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu;
4. Diperoleh nilai PKRT yang telah di-*adjust*;
5. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota

terdekat);

6. PKRT ADHK 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke-4 dengan hasil poin ke-5.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

I. Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumah tangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

II. Konsep dan Definisi

LNPRT merupakan bagian dari Lembaga Non Profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumah tangga. Karakteristik unit LNP adalah sbb :

1. LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
2. pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
3. setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai profit atau surplus, karena profit yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
4. kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
5. istilah nonprofit tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 6 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi dan serikat buruh, Organisasi kebudayaan, olahraga dan rekreasi, Partai politik dan Lembaga keagamaan.

III. Cakupan

Nilai Pengeluaran Konsumsi LNPRT (PKLNPRT) sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

1. Konsumsi antara, contoh: pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
2. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
3. Penyusutan
4. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dan lain-lain.

IV. Penghitungan PKLNPRT Tahunan

1. Sumber Data

Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SKLNP).

- a. Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- b. Hasil up-dating direktori LNPRT
Informasi yang diperoleh dari hasil up-dating direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- c. Indeks Harga Konsumen (IHK)

2. Metode penghitungan

PKLNPRRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PKLNPRRT adalah sebagai berikut :

- a. Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenis-nya dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

$\bar{x}_{ij}$: Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

x_{ij} : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i : Jenis lembaga LNPRT, = 1, 2, 3, ..., 6

j : Jenis pengeluaran LNPRT, = 1, 2, 3, 4

- b. Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$X = \sum_{i=1}^6 \sum_{j=1}^4 \bar{x}_{ij} \times N_i$$

X : PK-LNPRT adh Berlaku

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PKLNPRRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKLNPRRT atas dasar harga

konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PKLNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

I. Pendahuluan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lain-nya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang dan jasa maupun aktivitas investasi.

II. Konsep dan Definisi

Besarnya nilai Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PKP mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sebagai berikut :

1. Memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang

diproduksi oleh perusahaan.

Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dan sebagainya. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidentil dari fungsi pokok unit pemerintah.

2. Memproduksi jasa.

Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

III. Cakupan

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PKP) Provinsi mencakup : (a) PK Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah provinsi; (b) PK Pemerintah Provinsi yang bersangkutan; (c) PK Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah Provinsi; (d) PK Pemerintah Desa/ Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah Provinsi bersangkutan.

IV. Penghitungan PKP Tahunan

1. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PKP Provinsi Tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)
- b. Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu)

- c. Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- d. Output Bank Indonesia (BI)
- e. Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

2. Metode penghitungan

- a. PKP Provinsi atas dasar harga berlaku (ADHB)

Secara umum, PKP ADHB dihitung menggunakan rumusan berikut :

$$\text{PKP ADHB} = \text{Output non pasar} - \text{penjualan barang dan jasa} + \text{output Bank Indonesia}$$

Output non-pasar dihitung dengan pendekatan biaya yg dikeluarkan, yaitu : Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level Provinsi, PK-P Provinsi ADHB, dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah Provinsi itu sendiri + pengeluaran akhir konsumsi pemerintah seluruh pemerintahan Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi tersebut + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah provinsi tersebut + pengeluaran pemerintah pusat yang menjadi bagian dari Provinsi yang bersangkutan.

- b. PKP Provinsi atas dasar harga konstan (ADHK)

Pengeluaran konsumsi pemerintah ADHK dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

I. Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

II. Konsep dan Definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

III. Cakupan

PMTB terdiri dari :

1. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan

bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagai-nya;

2. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (seperti overhaul mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

IV. Penghitungan PMTB Tahunan

1. Sumber Data

- a. Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Prov/Kab/Kota.
- b. Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.
- c. Hasil Survei Disagregasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (SD-PMTB)
- d. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil & Rumah tangga (level provinsi).
- e. Laporan keuangan perusahaan.
- f. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level provinsi.
- g. IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
- h. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas).
- i. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum.
- j. Publikasi Statistik Konstruksi.
- k. Data Eksplorasi Mineral dari Kementrian Energi dan Sumber Daya

Mineral (ESDM).

I. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.

2. Metode penghitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung.

Sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “ arus komoditas”. Dalam hal ini penyediaan atau “*supply*” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

a. Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (adh) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai adh berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB adh Konstan, maka PMTB adh Berlaku

tersebut di “*deflate*” (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

b. Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik *adh Berlaku* maupun *adh Konstan*.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasi output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB *adh Berlaku*. Untuk memperoleh nilai atas dasar harga konstan adalah dengan men-*deflate* PMTB (*adh Berlaku*) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan kedua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara “ekstrapolasi” atau mengalikan PMTB *adh Konstan* dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB *adh Konstan* terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB *adh Berlaku*, nilai PMTB *adh Konstan* tersebut di “*inflate*” (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis

barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB adh Konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara:

Pertama, PMTB adh Berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rician tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). *Kedua*, untuk memperoleh PMTB adh Konstan adalah dengan cara men“deflate” PMTB adh Berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB adh Berlaku untuk barang modal tak-berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan adh Berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB adh Konstan-nya diperoleh dengan men-deflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunan-nya.

Untuk perangkat lunak, PMTB adh Berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang *software*. Untuk adh Konstan diperoleh dengan men-deflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB adh Konstan-nya diperoleh dengan cara mendeflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak-langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Transport and Trade Margin*) sulit diperoleh.
- c. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

2.5 PERUBAHAN INVENTORI

I. Pendahuluan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal.

Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan

data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

II. Konsep dan Definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna pertambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

III. Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sebagai berikut :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air

- bersih, serta konstruksi;
- b. Berbagai jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
 - c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
 - d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
 - e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
 - f. Ternak untuk tujuan dipotong;
 - g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
 - h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

IV. Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah :

- a. Hasil Survei Khusus Studi Penyusunan Perubahan Inventori (SKSPPI)
- b. Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau dari mengunduh website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- c. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD
- d. Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalan;
- e. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.

- f. Data komoditas perkebunan;
- g. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan
- h. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.
- i. Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Ditjennak Kementan.

2. Metode penghitungan

Terdapat 2 metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi “korporasi”, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi “komoditas”.

Di lihat dari sisi manfaat-nya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

a. Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori adh berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sebagai berikut :

1. Menghitung posisi inventori adh Konstan, dengan cara mendeflate stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
2. Menghitung perubahan inventori adh Konstan dengan mengurangkan posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan

3. Menghitung perubahan inventori adh Berlaku dengan meng*inflate* perubahan inventori adh Konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

b. Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori adh Berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori adh Konstan dihitung dengan: a. mende*flate* nilai perubahan inventori adh Berlaku dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah bahwa :

1. Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
2. Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harga-nya;
3. Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
4. Diperlukan *adjustment* dengan cara me-*mark-up*, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia;

2.6 EKSPOR DAN IMPOR

I. Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

II. Konsep dan Definisi

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

III. Cakupan

Ekspor-Impor pada suatu wilayah terdiri dari :

1. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut
2. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut
Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya
3. Net Ekspor antar daerah
 - a. Ekspor antar daerah
 - b. Impor antar daerah

IV. Penghitungan Ekspor-Impor Tahunan

1. Sumber Data

- a. Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$)
- b. Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$)
- c. Neraca Pembayaran Indonesia dari BI
- d. Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan
- e. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang
- f. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei
- g. Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia.

2. Metode penghitungan

Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga *free on board* (fob) dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/ dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented transaction*) baik oleh residen maupun non residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.

BAB III

TINJAUAN PEREKONOMIAN PROVINSI SUMATERA SELATAN BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN TAHUN 2019-2023



Adanya perubahan kondisi ekonomi Provinsi Sumatera Selatan akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2019 s.d 2023 tak lepas dari pengaruh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Faktor eksternal lebih dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

Pada awal tahun 2020, pandemi virus, yang dikenal dengan nama Covid-19 melanda seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Bahkan WHO mendeklarasikannya sebagai pandemi global. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan telah mengambil berbagai strategi dan langkah untuk memutuskan rantai penyebaran virus ini, mulai dari menerapkan *lockdown*, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), penerapan sekolah serta bekerja dari rumah. Seluruh aktivitas masyarakat menjadi terbatas dan tempat transaksi ekonomi, mulai dari kantor, toko, pusat perbelanjaan, sampai bandara pun ditutup. Hanya toko atau supermarket yang menjual kebutuhan pokok yang masih diperbolehkan untuk tetap buka. Kondisi ini tidak hanya membuat kehidupan sosial masyarakat berubah namun juga membuat perekonomian terguncang, tak terkecuali di Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk menyelamatkan ekonomi yang terganggu akibat dari pandemi covid-19 ini, akhirnya pemerintah menerapkan tatanan normal baru atau era new normal. Dimana beberapa aktivitas masyarakat sudah diperbolehkan namun tetap mematuhi protokol kesehatan.

Pada tahun 2022 ini, WHO mengumumkan bahwa seluruh dunia memasuki masa transisi dari pandemi menjadi endemi, dimana Covid-19 menjadi wabah penyakit yang secara konsisten ada tetapi terbatas pada wilayah tertentu. Meskipun demikian, berbagai kebijakan dan program masih terus diupayakan pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi.

3.1 TINJAUAN AGREGAT PDRB PROVINSI SUMATERA SELATAN MENURUT PENGELUARAN

Kondisi perekonomian Sumatera Selatan tahun 2019-2023 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali tahun 2020 perekonomian di Sumatera Selatan mengalami goncangan dikarenakan adanya wabah virus Covid-19. Perubahan ekonomi tersebut digambarkan melalui nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) serta pertumbuhan total PDRB. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume.

Tabel 3.1
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Sumatera Selatan
Menurut Pengeluaran (miliar rupiah), 2019–2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Konsumsi Rumah Tangga	296.904,98	295.605,35	308.635,30	347.794,20	381.441,02
2 Konsumsi LNPRT	7.240,99	6.748,58	7.130,46	8.067,44	8.968,84
3 Konsumsi Pemerintah	36.686,87	31.995,00	34.055,60	34.163,92	37.028,28
4 PMTB	160.152,72	162.651,12	165.435,57	182.083,24	191.036,81
5 Perubahan Inventori	-731,37	-1.972,33	380,65	-2,48	2,51
6 Net Ekspor Barang dan Jasa	-46.851,48	-40.420,32	-22.000,73	17.960,79	10.622,20
Total PDRB	453.402,71	454.607,40	493.636,85	590.067,10	629.099,66

Catatan: * Angka sementara

** Angka sangat sementara

Data di atas menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Sumatera Selatan digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori).

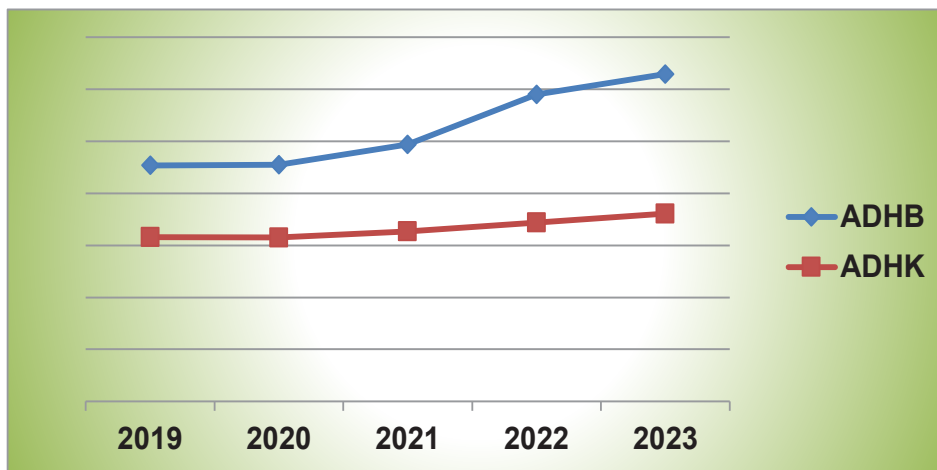
Selain dinilai ADHB, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai ADHK 2010 atau atas dasar harga berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan atas dasar harga konstan, PDRB dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB komponen pengeluaran atas dasar harga konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2019–2023 gambaran tentang perkembangan ekonomi Sumatera Selatan berdasarkan PDRB ADHK dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Sumatera Selatan
Menurut Pengeluaran (miliar rupiah), 2019–2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Konsumsi Rumah Tangga	190.641,45	186.943,08	190.560,72	201.978,44	212.618,53
2 Konsumsi LNPRT	5.009,23	4.710,91	4.806,55	5.067,13	5.410,88
3 Konsumsi Pemerintah	22.801,46	19.869,06	20.444,95	20.691,85	21.746,26
4 PMTB	113.186,34	114.605,19	111.007,10	108.306,92	110.986,58
5 Perubahan Inventori	-319,38	-1.331,43	54,85	-108,83	10,21
6 Net Ekspor Barang dan Jasa	-15.854,35	-9.667,59	-468,99	7.524,36	10.138,55
Total PDRB	315.464,75	315.129,22	326.405,18	343.459,88	360.911,01

Catatan: * Angka sementara

** Angka sangat sementara



**Gambar 3.1 Perbandingan PDRB ADHB dan ADHK 2010
Provinsi Sumatera Selatan Menurut
Pengeluaran (miliar rupiah), 2019–2023**

Dari grafik di atas nampak bahwa pada umumnya nilai PDRB ADHB selalu lebih besar dari nilai PDRB ADHK. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB ADHB.

Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya yang terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi LNPRT (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dan Net Ekspor Barang dan Jasa yang diperoleh dari Ekspor Barang dan Jasa dikurangi Impor Barang dan Jasa.

**Tabel 3.3
Distribusi PDRB ADHB Provinsi Sumatera Selatan
Menurut Pengeluaran (persen), 2019–2023**

Komponen Pengeluaran		2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Konsumsi Rumah Tangga	65,48	65,02	62,52	58,94	60,63
2	Konsumsi LNPRT	1,60	1,48	1,44	1,37	1,43
3	Konsumsi Pemerintah	8,09	7,04	6,90	5,79	5,89
4	PMTB	35,32	35,78	33,51	30,86	30,37
5	Perubahan Inventori	-0,16	-0,43	0,08	0,00	0,00
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	-10,33	-8,89	-4,46	3,04	1,69
Total PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan: * Angka sementara

** Angka sangat sementara

Berdasarkan tabel 3.3 di atas terlihat bahwa selama periode 2019-2023 produk yang dikonsumsi di wilayah domestik sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (di atas 50 persen).

Pengeluaran untuk kapital, yang tercermin dari Pembentukan Modal Tetap Bruto juga mempunyai andil yang cukup besar dengan kontribusi diatas 30 persen. Proporsi konsumsi akhir pemerintah berada pada rentang 5-8 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah juga berperan dalam menyerap produk domestik. Lembaga Non Profit memiliki peran terkecil dalam konsumsi di wilayah Sumatera Selatan, yakni hanya 1 persen.

Di sisi lain, pada tahun 2019-2021 perdagangan internasional dan antar provinsi menunjukkan bahwa nilai net ekspor impor barang dan jasa selalu bernilai negatif yang berarti bahwa ekspor lebih rendah dibandingkan nilai impor. Hal ini cukup wajar, karena wilayah Sumatera Selatan bukanlah daerah sentra industri seperti yang ada di Pulau Jawa, jadi untuk memenuhi kebutuhan permintaan akhir dan pengeluaran kapital kita masih banyak membutuhkan *supply* barang dan jasa dari wilayah provinsi lainnya. Namun pada tahun 2022 dan 2023, Sumatera Selatan mampu mencapai kondisi surplus, dimana nilai ekspor lebih tinggi dibandingkan nilai impor.

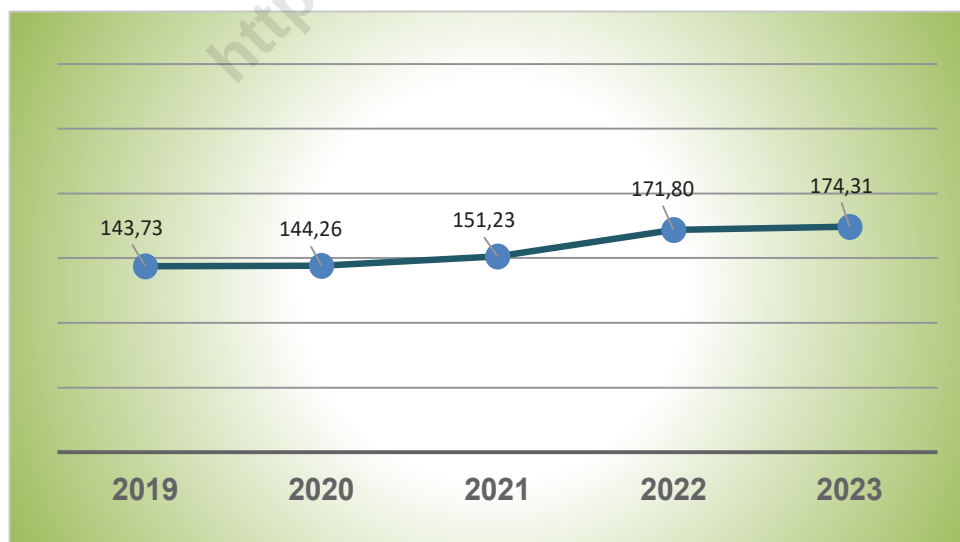
Tabel 3.4
Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Provinsi Sumatera Selatan
Menurut Pengeluaran (persen), 2019–2023

Komponen Pengeluaran		2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Konsumsi Rumah Tangga	3,94	-1,94	1,94	5,99	5,27
2	Konsumsi LNPR	9,78	-5,96	2,03	5,42	6,78
3	Konsumsi Pemerintah	5,54	-12,86	2,90	1,21	5,10
4	PMTB	1,69	1,25	-3,14	-2,43	2,47
5	Perubahan Inventori	40,32	316,88	-104,12	-298,42	-109,38
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	-28,51	-39,02	-95,15	-1.704,37	34,74
Total PDRB		5,69	-0,11	3,58	5,23	5,08

Catatan: * Angka sementara
** Angka sangat sementara

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Hingga tahun 2019, Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun, akibat dari pandemi Covid-19 yang mulai mewabah di Indonesia sejak awal Maret 2020 menyebabkan perekonomian Provinsi Sumatera Selatan mengalami kontraksi sebesar 0,11 persen. Namun, pada tahun 2021 kondisi perekonomian Provinsi Sumatera Selatan mulai pulih sehingga mengalami pertumbuhan sebesar 3,58 persen dan semakin tumbuh pada tahun 2023, yakni sebesar 5,08 persen.

Sementara itu indeks implisit PDRB yang menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri), juga menunjukkan peningkatan. Indeks Implisit Sumatera Selatan dari tahun 2019 sampai dengan 2023 secara berturut-turut masing-masing menunjukkan 143,73 persen (2019); 144,26 persen (2020); 151,23 persen (2021); 171,80 persen (2022) dan 174,31 persen (2023).



Gambar 3.2 Indeks Implisit PDRB Provinsi Sumatera Selatan Menurut Pengeluaran (persen), 2019–2023

3.2 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran. Data berikut menunjukkan bahwa sebesar 60 persen PDRB Provinsi Sumatera Selatan disumbang oleh konsumsi akhir rumah tangga, dimana sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga.

Tabel 3.5
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga, 2019–2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga (miliar rupiah)					
a. ADHB	296.904,98	295.605,35	308.635,30	347.794,20	381.441,02
b. ADHK 2010	190.641,45	186.943,08	190.560,72	201.978,44	212.618,53
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	65,48	65,02	62,52	58,94	60,63
Rata-rata konsumsi per Rumah Tangga/tahun (ribu rupiah)					
a. ADHB	143.657,84	144.022,17	133.514,43	148.740,86	161.406,44
b. ADHK 2010	92.242,10	91.080,72	82.435,83	86.379,95	89.969,35
Rata-rata konsumsi per kapita/tahun (ribu rupiah)					
a. ADHB	34.941,52	35.010,87	36.103,55	40.220,15	43.625,56
b. ADHK 2010	22.435,81	22.141,14	22.291,42	23.357,50	24.317,26
Pertumbuhan	3,94	- 1,94	1,94	5,99	5,27
a. Total konsumsi RT	2,39	- 1,26	- 9,49	4,78	4,16
b. Per RT	2,38	- 1,31	,68	4,78	4,11
c. Per kapita	2,38	-1,31	0,65	4,69	4,69
Jumlah RT (000 unit)	2.067	2.052	2.312	2.338	2.363
Jumlah penduduk (000 org)	8.497	8.443	8.549	8.647	8.744

Catatan: * Angka sementara

** Angka sangat sementara

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2019 sampai dengan 2023 cenderung menurun. Tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu 65,48 persen dan terendah terjadi pada tahun 2022 yaitu 58,94 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga semakin berpikir untuk menabung (*saving*) daripada untuk konsumsi (*consumption*).

Dalam kurun waktu 2019-2023, konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal (ADHB) maupun riil (ADHK), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Konsumsi akhir rumah tangga pada tahun 2019 hingga 2023 mengalami pertumbuhan yang berfluktuatif, berkisar 3-5 persen. Melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik (termasuk yang berasal dari impor) turut menjadi pemicu meningkatnya belanja untuk konsumsi termasuk konsumsi rumah tangga. Namun pada tahun 2020, konsumsi akhir rumah tangga mengalami penurunan sebesar 1,94 persen. Hal ini tidak terlepas dari akibat terjadinya pandemi Covid-19 yang mengubah gaya hidup masyarakat dari berbagai aspek. Akibat dari pandemi ini, tidak sedikit perusahaan yang akhirnya menutup usahanya dan terpaksa memberhentikan karyawannya. Banyak masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan dasar saja begitu sulit. Berkurangnya kasus positif covid-19 membuat kondisi perekonomian semakin membaik. Sehingga pada tahun 2023, konsumsi akhir rumah tangga mencapai pertumbuhan sebesar 5,27 persen.

Konsumsi per rumah tangga, baik menurut ADHB maupun ADHK 2010 terus meningkat dari tahun 2019 sampai 2023, namun mengalami penurunan pada tahun 2021. Pada tahun 2019, secara umum setiap rumah tangga di Sumatera Selatan menghabiskan dana sekitar 143.657.835 rupiah setahun untuk membiayai konsumsi baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang perumahan, Pendidikan dsb). Pengeluaran ini terus meningkat hingga menjadi 161.406.436 rupiah pada tahun 2023. Jika melihat nominalnya dalam rupiah per bulan setiap rumah tangga melakukan

konsumsinya pada level 11 juta rupiah pada tahun 2019, meningkat sampai pada level 13 juta rupiah pada tahun 2023.

Sementara itu, pada perkiraan ADHK 2010, rata-rata konsumsi rumah tangga per rumah tangga tumbuh pada kisaran 2-4 persen pada rentang waktu tahun 2019-2023 dan mengalami kontraksi pada tahun 2020 dan 2021. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 4,78 persen. Di sisi lain, rata-rata konsumsi per kapita juga menunjukkan perkembangan yang searah dengan kenaikan jumlah penduduk, dan selalu diikuti pula oleh kenaikan nilai konsumsinya. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per kapita tahun 2019 sampai tahun 2023 menunjukkan peningkatan, baik ADHB maupun ADHK 2010. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk di Provinsi Sumatera Selatan meningkat, baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara nilai (termasuk juga peningkatan kualitas). Peningkatan rata-rata konsumsi per kapita berkisar antara 0,68 hingga 4,78 persen. Namun pada tahun 2020, rata-rata konsumsi per kapita mengalami penurunan sebesar 1,31 persen. Peningkatan maupun penurunan ini secara otomatis berpengaruh terhadap perubahan struktur konsumsi rumah tangga.

Tabel 3.6
Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Provinsi Sumatera Selatan (persen), 2019–2023

Komponen Konsumsi		2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a.	Makanan dan Minuman, Selain Restoran	56,84	57,56	57,66	58,41	59,63
b.	Pakaian, Alas Kaki dan Jasa Perawatannya	4,01	4,04	4,09	4,13	3,99
c.	Perumahan dan Perlengkapan Rumahtangga	10,04	10,08	10,07	10,00	9,56
d.	Kesehatan dan Pendidikan	7,02	7,34	7,38	7,06	6,78
e.	Transportasi dan Komunikasi	13,15	12,35	12,03	11,99	11,85
f.	Restoran dan Hotel	5,49	4,96	5,01	4,89	4,76
g.	Lainnya	3,45	3,67	3,77	3,53	3,43
Total Konsumsi		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan: * Angka sementara

** Angka sangat sementara

Secara rata-rata dari tahun 2019-2023 nampak pada struktur konsumsi akhir rumah tangga Sumatera Selatan, bahwa konsumsi makanan lebih tinggi dibandingkan konsumsi bukan makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan cenderung masih berada pada kisaran 56-59 persen.

Pola proporsi konsumsi di atas, menunjukkan tarik menarik antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan yang masih cukup kuat. Sungguhpun demikian, pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat.

Tabel 3.7
Pertumbuhan Riil Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Provinsi Sumatera Selatan (persen), 2019–2023

Komponen Konsumsi		2019	2020	2021	2022*	2023**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a.	Makanan dan Minuman, Selain Restoran	4,58	-1,42	1,30	6,53	6,94
b.	Pakaian, Alas Kaki dan Jasa Perawatannya	2,48	-0,68	0,60	7,46	1,42
c.	Perumahan dan Perlengkapan Rumah tangga	2,47	-0,62	2,68	5,97	2,63
d.	Kesehatan dan Pendidikan	3,35	2,71	3,77	2,53	2,10
e.	Transportasi dan Komunikasi	3,90	-5,74	1,28	6,25	4,31
f.	Restoran dan Hotel	2,77	-10,07	5,11	7,62	4,07
g.	Lainnya	2,92	2,48	5,36	0,68	3,06
Total Konsumsi		3,94	-1,94	1,94	5,99	5,27

Catatan: * Angka sementara

** Angka sangat sementara

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga ADHK sebesar 3,94 persen pada tahun 2019. Kemudian sempat berkontraksi sebesar 1,94 persen pada tahun 2020. Selanjutnya konsumsi rumah tangga kembali tumbuh di 1,94 persen pada tahun 2021; 5,99 persen pada tahun 2022 dan 5,27 persen pada tahun 2023. Sementara itu konsumsi per kapita meningkat dari 2,38 persen di tahun 2019 menjadi 4,11 di tahun 2023. Nampak bahwa peningkatan keseluruhan konsumsi rumah tangga secara “riil” lebih tinggi dari peningkatan jumlah penduduk dan ini mengindikasikan

terjadi perubahan tingkat kemakmuran masyarakat. Kecuali tahun 2020, meskipun jumlah penduduk bertambah, namun justru konsumsi rumah tangga secara “riil” menurun. Hal ini disebabkan pandemi Covid-19 yang menyebabkan terbatas hingga hilangnya kesempatan masyarakat untuk mencari pendapatan yang pada akhirnya mempengaruhi konsumsi barang dan jasa.

Pertumbuhan pengeluaran rumah tangga untuk setiap sub kelompok konsumsi menunjukkan angka yang cukup berfluktuasi. Pertumbuhan ini menunjukkan adanya perubahan konsumsi rumah tangga dalam bentuk kuantum (volume) dari waktu ke waktu. Informasi ini menunjukkan terjadinya peningkatan kemakmuran masyarakat, meskipun hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu.

Pandemi Covid-19 membuat orang beralih menjadi lebih peduli dengan kesehatan. Hal ini tercermin dari sub kelompok konsumsi kesehatan dan kelompok lainnya tetap mengalami pertumbuhan pada tahun 2020, masing-masing sebesar sebesar 2,71 persen dan 2,48 persen. Masyarakat menjadi lebih peduli dengan kesehatan dengan mengkonsumsi berbagai suplemen dan vitamin penambah daya tahan tubuh, selalu menyediakan *handsanitizer*, mencuci tangan dan selalu memakai masker. Sub kelompok konsumsi lainnya mengalami kontraksi, dengan kisaran 0,68 persen hingga mencapai 10 persen. Hal ini dapat dimaklumi karena pada saat pandemi Covid-19, seluruh aktivitas masyarakat sangat terbatas dan dihimbau sebisa mungkin untuk tidak melakukan aktivitas keluar rumah. Bahkan ada pelarangan untuk melakukan pulang kampung saat Idul Fitri, penutupan tempat rekreasi dan hiburan. Selain itu, banyak masyarakat yang memilih untuk menyiapkan sendiri makanannya ketimbang membeli di luar karena dianggap lebih aman. Tahun 2021 hingga tahun 2023, konsumsi rumah tangga berangsur-angsur normal, tercermin dari peningkatan seluruh sub kelompok konsumsi.

Tabel 3.8
Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah
Tangga Provinsi Sumatera Selatan (persen), 2019–2023

Komponen Konsumsi		2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a.	Makanan dan Minuman, Selain Restoran	3,00	2,28	3,25	7,14	4,70
b.	Pakaian, Alas Kaki dan Jasa Perawatannya	2,12	1,01	4,96	6,05	4,45
c.	Perumahan dan Perlengkapan Rumahtangga	2,10	0,56	1,67	5,53	2,20
d.	Kesehatan dan Pendidikan	2,75	1,46	1,03	5,20	3,15
e.	Transportasi dan Komunikasi	3,23	-0,85	0,40	5,71	3,91
f.	Restoran dan Hotel	2,39	-0,04	0,30	2,26	2,72
g.	Lainnya	2,46	3,34	1,83	4,77	3,46
Total Konsumsi		2,84	1,53	2,43	6,32	4,19

Catatan: * Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sementara itu, tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam tabel diatas menunjukkan fluktuasi setiap tahunnya. Selama rentang tahun 2019 hingga tahun 2023, peningkatan harga (inflasi) tertinggi yang terjadi pada tahun 2022 pada sub kelompok makanan, yaitu sebesar 7,14 persen. Pada tahun 2020, terjadinya penurunan harga untuk sub kelompok transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya serta sub kelompok hotel dan restoran, masing-masing sebesar 0,85 persen dan 0,04 persen. Kondisi ini dikarenakan pada saat diberlakukannya era new normal, banyak usaha-usaha terkait sub kelompok tersebut menurunkan harga dengan memberikan potongan harga atau diskon sebagai strategi untuk menarik konsumen kembali. Sedangkan pada tahun 2022, peningkatan harga (inflasi) tertinggi yang terjadi pada sub kelompok makanan dan terendah pada sub kelompok hotel dan restoran. Tahun 2023, seluruh sub kelompok mengalami peningkatan pada rentang 2 sampai 5 persen.

3.3 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Konsumsi akhir LNPRT peranannya dalam PDRB menurut pengeluaran sangat minor dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Dari tahun 2019–2023, peran LNPRT terhadap total PDRB berkisar antara 1,37 hingga 1,60 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian Sumatera Selatan semestinya dapat lebih ditingkatkan lagi.

Tabel 3.9
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi LNPRT
Provinsi Sumatera Selatan, 2019–2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT (miliar rupiah)					
a. ADHB	7.240,99	6.748,58	7.130,46	8.067,44	8.968,84
b. ADHK 2010	5.009,23	4.710,91	4.806,55	5.067,13	5.410,88
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	1,60	1,48	1,44	1,37	1,43
Pertumbuhan (%)	9,78	-5,96	2,03	5,42	6,78

Catatan: * Angka sementara

** Angka sangat sementara

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir LNPRT menunjukkan peningkatan dari tahun 2018 sampai tahun 2022, baik untuk ADHB maupun ADHK 2010, kecuali pada tahun 2020. Pada tahun 2019 total pengeluaran konsumsi akhir LNPRT ADHB sebesar 7,24 triliun rupiah, kemudian meningkat pada tahun 2023 mencapai 8,97 triliun rupiah. Namun di tahun 2020 pengeluaran konsumsi akhir LNPRT menurun menjadi 6,75 triliun rupiah. Konsumsi LNPRT ADHK 2010 juga mengalami pertumbuhan sebesar hingga 9,78 persen pada tahun 2019. LNPRT tidak luput dari efek pandemi Covid-19. Hal ini tercermin dari pertumbuhan konsumsi akhir LNPRT pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar 5,96 persen. Akibat Pandemi Covid-19, banyak kegiatan-kegiatan partai dan lembaga non profit lainnya ditunda. Bahkan sempat

dikeluarkannya edaran pemerintah agar masyarakat melakukan ibadah di rumah masing-masing, termasuk kegiatan sholat Tarawih, sholat Jumat, dan sholat Idul Fitri. Ketika sudah diberlakukannya Era New Normal, kegiatan LNPRT pun tetap terbatas. Kegiatan Pilkada di beberapa daerah di Sumatera Selatan, perayaan Natal dan Tahun Baru pun tidak semeriah tahun sebelumnya. Musyawarah dan pertemuan-pertemuan yang biasanya dilakukan dengan mengumpulkan banyak orang kini dilakukan secara *virtual*. Namun, sejak tahun 2021 konsumsi akhir LNPRT mulai mengalami pertumbuhan sebesar 2,03 persen dan pada tahun 2023 tumbuh sebesar 6,78 persen.

3.4 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan pengeluaran akhir rumah tangga dan LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu wilayah.

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik untuk ADHB maupun ADHK 2010. Pada tahun 2019 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah ADHB sebesar 36,69 triliun rupiah, kemudian menurun menjadi 31,99 triliun rupiah pada tahun 2020. Pada tahun 2021 konsumsi akhir pemerintah mengalami peningkatan kembali mencapai 34,06 triliun rupiah dan 37,03 triliun rupiah pada tahun 2023. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah ADHK 2010, yang juga mengalami peningkatan pada tahun 2019, kemudian menurun di tahun 2020, untuk kemudian tumbuh kembali di tahun 2021 hingga tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas meskipun di tahun 2020 menjadi terhambat dikarenakan situasi pandemi yang melanda.

Pengeluaran akhir pemerintah memiliki peran yang cukup berarti terhadap PDRB yaitu sekitar 5 hingga 8 persen. Sepanjang periode tersebut proporsi tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu 8,09 persen sedangkan proporsi terendah pada tahun 2022 yang mencapai 5,79 persen.

Tabel 3.10
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan, 2019–2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah (miliar rupiah)					
a. ADHB	36.686,87	31.995,00	34.055,60	34.163,92	37.028,28
b. ADHK 2010	22.801,46	19.869,06	20.444,95	20.691,85	21.746,26
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)					
	8,09	7,04	6,90	5,79	5,89
Konsumsi Pemerintah per-kapita (ribu rupiah)					
a. ADHB	4.317,53	3.789,42	3.983,76	3.950,84	4.234,94
b. ADHK 2010	2.683,41	2.353,25	2.391,61	2.392,88	2.487,13
Konsumsi Pemerintah per-pegawai pemerintah (ribu rupiah)					
a. ADHB	277.709,96	242.283,58	268.910,26	248.499,21	244.598,41
b. ADHK 2010	172.601,02	150.459,32	161.437,65	150.507,01	143.649,64
Pertumbuhan (%)					
a. Total konsumsi pemerintah	5,54	- 12,86	2,90	1,21	5,10
b. Konsumsi per kapita	3,96	- 12,30	1,63	0,05	3,94
c. Konsumsi per-pegawai	5,49	- 12,83	7,30	- 6,77	- 4,56
Jumlah Pegawai Pemerintah					
	132.105	132.056	126.643	137.481	151.384
Jumlah penduduk (000 org)					
	8.497	8.443	8.549	8.647	8.744

Catatan: * Angka sementara
 ** Angka sangat sementara

Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, kecuali di tahun 2020 terjadi penurunan. Hal ini sejalan dengan rata-rata konsumsi pemerintah per kapita. Pada tahun 2019 konsumsi pemerintah per kapita ADHB sebesar 4,32 miliar rupiah dan menurun pada tahun 2020

menjadi 3,79 miliar rupiah, lalu meningkat kembali pada tahun 2021 menjadi 3,98 miliar rupiah. Pada tahun 2022, konsumsi pemerintah per kapita ADHB mengalami sedikit penurunan menjadi sebesar 3,95 miliar rupiah. Hal ini dikarenakan peningkatan konsumsi pemerintah lebih kecil dibandingkan dengan penambahan jumlah penduduk. Namun, meningkat pada tahun 2023 menjadi 4,23 miliar rupiah.

Rata-rata konsumsi pemerintah per kapita ADHK (2010) menunjukkan adanya pertumbuhan selama tahun 2019. Pertumbuhan di tahun 2019 sebesar 3,96 persen dan kemudian berkontraksi pada tahun 2020 sebesar 12,30 persen. Namun pada tahun 2021, konsumsi pemerintah per kapita mampu tumbuh kembali hingga 1,63 persen dan mencapai sebesar 3,94 persen pada tahun 2023.

Rata-rata konsumsi per-pegawai pemerintah menunjukkan kecenderungan yang sama dengan per kapita. Pada tahun 2019 konsumsi pemerintah per-pegawai pemerintah tumbuh sebesar 5,49 persen. Selanjutnya mengalami kontraksi sebesar 12,83 persen di tahun 2020. Namun, pada tahun 2021 mampu tumbuh signifikan sebesar 7,30 persen meskipun mengalami kontraksi kembali pada tahun 2022 dan 2023 masing-masing sebesar 6,77 persen dan 4,56 persen.

Hal lain yang patut dicermati adalah perbandingan antara jumlah pegawai pemerintah dengan jumlah penduduk. Data di atas menunjukkan bahwa jumlah pegawai pemerintah berfluktuasi secara gradual dari 132.105 orang pada tahun 2019 menjadi 151.384 orang pada tahun 2023. Sedangkan jumlah penduduk meningkat dari 8.497 ribu orang pada tahun 2019 menjadi 8.744 ribu orang pada tahun 2023. Rasio antara penduduk dengan pegawai pemerintah dalam kurun waktu tersebut menurun dari 64 (2019) menjadi 58 (2023). Hal ini berarti pada tahun 2019, setiap satu pegawai pemerintah melayani sekitar 64 penduduk dan menurun menjadi sekitar 58 penduduk pada tahun 2023.

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara “riil” menunjukkan peningkatan baik secara keseluruhan maupun rata-rata per-penduduk. Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas penggunaan sumber daya finansial oleh pemerintah. Pertumbuhan tertinggi terjadi

pada tahun 2019 untuk total konsumsi pemerintah yaitu sebesar 5,54 persen; untuk konsumsi per kapita 3,96 persen; dan untuk konsumsi per-pegawai 5,49 persen.

Tabel 3.11
Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan, 2019–2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Struktur Konsumsi Akhir (belanja)					
Pemerintah (miliar rupiah)					
a. Konsumsi Kolektif (miliar rupiah)	27.625,16	22.056,66	22.502,44	23.209,65	26.248,81
(%)	75,30	68,94	66,08	67,94	70,89
b. Konsumsi Individu (miliar rupiah)	9.061,72	9.938,34	11.553,16	10.954,27	10.779,48
(%)	24,70	31,06	33,92	32,06	29,11
Total Konsumsi (miliar rupiah)	36.686,87	31.995,00	34.055,60	34.163,92	37.028,28
(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan (%)					
a. Konsumsi Kolektif	12,96	- 21,19	- 2,84	0,33	8,22
b. Konsumsi Individu	- 9,47	8,16	13,45	2,58	0,29
Total Konsumsi	5,54	- 12,86	2,90	1,21	5,10

Catatan: * Angka sementara
** Angka sangat sementara

Secara struktur, bagian terbesar dari pengeluaran pemerintah adalah untuk konsumsi kolektif, sekitar 66-75 persen pengeluaran pemerintah untuk membiayai belanja konsumsi tersebut. Menarik untuk dicermati, secara struktur pengeluaran konsumsi kolektif dan individu pemerintah mengalami pergeseran. Pada rentang 2019-2023, proporsi pengeluaran konsumsi kolektif mengalami penurunan, dimana pada tahun 2019 proporsinya mencapai 75,30 persen dan menjadi 70,89 persen pada tahun 2023. Sebaliknya, pengeluaran konsumsi individu mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2019 proporsinya mencapai 24,70 persen dan menjadi 29,11 persen pada tahun 2023. Perubahan struktur pengeluaran konsumsi pemerintah ini tidak lepas kaitannya dengan pandemi Covid-19. Untuk menangani pandemi tersebut, pemerintah telah melakukan pemotongan anggaran untuk belanja-belanja yang tidak

bisa dilakukan, seperti perjalanan dinas dan kegiatan lainnya, kemudian merealokasi anggaran tersebut untuk dana kesehatan dan bantuan sosial.

Secara nominal, pengeluaran konsumsi kolektif pemerintah mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2020. Pada tahun 2019, pengeluaran konsumsi kolektif sebesar 27,63 triliun rupiah. Kemudian menurun menjadi 22,06 triliun rupiah pada tahun 2020 akibat pandemi dan kembali meningkat pada tahun 2021 hingga 2023 sebesar 26,25 triliun rupiah.

Sebaliknya, pengeluaran konsumsi individu pemerintah pada tahun 2019 sebesar 9,06 triliun rupiah. Berbeda dengan pengeluaran penyusun PDRB lainnya yang mengalami penurunan pada tahun 2020 akibat pandemi, pengeluaran konsumsi individu justru mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan berbagai kebijakan yang diambil pemerintah di bidang kesehatan untuk mengatasi pandemi. Pada tahun 2020, pengeluaran konsumsi individu mencapai 9,94 triliun rupiah dan naik menjadi 11,55 triliun rupiah pada tahun 2021. Pada tahun 2022 dan 2023, status pandemi menjadi endemi, dimana kasus Covid-19 semakin melandai sehingga pengeluaran konsumsi individu juga semakin menurun, yakni masing-masing sebesar 10,95 triliun rupiah dan 10,78 triliun rupiah.

Konsumsi kolektif pemerintah yang terdiri dari penyelenggaraan pemerintah bidang ekonomi, ketahanan dan ketertiban, lingkungan hidup, pelayanan dan fasilitas umum mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Konsumsi kolektif pemerintah pada tahun 2019 mengalami pertumbuhan sebesar 12,96 persen. Namun pada tahun 2020 dan 2021, pertumbuhan konsumsi kolektif pemerintah mengalami kontraksi yang cukup dalam, masing-masing sebesar 21,19 persen dan 2,84 persen. Pada tahun 2022 kembali mengalami pertumbuhan sebesar 0,33 persen dan pada tahun 2023 tumbuh tinggi sebesar 8,22 persen.

Konsumsi individu pemerintah yang terdiri dari penyelenggaraan pemerintah bidang kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial juga mengalami pertumbuhan fluktuatif. Pada tahun 2019 kontraksi sebesar 9,47 persen. Pada tahun 2020 sebagian besar anggaran pemerintah digunakan untuk penanganan Covid-19 berupa pembelian

hazmat, obat-obat-obatan, masker medis, pemberian dana insentif bagi tenaga kesehatan, hingga bantuan berupa barang konsumsi untuk masyarakat menyebabkan konsumsi individu pemerintah meningkat signifikan sebesar 8,16 persen di tahun tersebut. Sedangkan pada tahun 2021, pemerintah gencar-gencarnya melakukan pemberian vaksinasi covid-19 sehingga konsumsi individu tumbuh signifikan menjadi 13,45 persen. Dengan berubahnya status pandemi menjadi endemi membuat pertumbuhan konsumsi individu melambat sebesar 0,29 persen pada tahun 2023.

Jika dilihat secara total, pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami pertumbuhan sebesar 5,54 persen di tahun 2019. Selanjutnya terjadi kontraksi pada tahun 2019 sebesar 12,86 persen. Secara nominal, anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk penanganan Covid-19 sangat besar. Namun besaran nominal tersebut tidak semuanya dimasukkan sebagai pengeluaran konsumsi pemerintah karena sebagian besar anggaran tersebut dipergunakan untuk pembelian alat-alat kesehatan, pembangunan rumah sakit, serta pembelian peralatan untuk menunjang pelayanan kesehatan yang tergolong ke dalam penambahan investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto) serta pemberian bantuan tunai berupa uang yang merupakan transaksi keuangan.

3.5 PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dalam PDRB menurut pengeluaran menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi fisik. Pada sisi berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital) . Kapital berfungsi sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Tabel 3.12
Perkembangan dan Struktur PMTB Provinsi Sumatera Selatan, 2019–2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB (miliar rupiah)					
a. ADHB	160.152,72	162.651,12	165.435,57	182.083,24	191.036,81
b. ADHK 2010	113.186,34	114.605,19	111.007,10	108.306,92	110.986,58
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)					
	35,32	35,78	33,51	30,86	30,37
Struktur PMTB					
a. Bangunan (miliar rupiah)	133.549,44	134.448,63	141.147,43	161.275,05	169.152,17
(%)	83,39	82,66	85,32	88,57	88,54
b. Non Bangunan (miliar rupiah)	26.603,27	28.202,49	24.288,14	20.808,19	21.884,64
(%)	16,61	17,34	14,68	11,43	11,46
Total PMTB (miliar rupiah)	160.152,72	162.651,12	165.435,57	182.083,24	191.036,81
(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan (%)					
a. Bangunan	4,53	0,27	0,63	1,26	2,75
b. Non Bangunan	-8,42	5,25	-17,76	-19,94	0,82
Total PMTB	1,69	1,25	-3,14	-2,43	2,47

Catatan: * Angka sementara

** Angka sangat sementara

Selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga maupun pemerintah), PMTB juga menunjukkan peningkatan secara nominal. Pada tahun 2019, total PMTB sebesar 160,15 triliun rupiah dan semakin meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 191,04 triliun rupiah pada tahun 2023. Namun sebaliknya, total PMTB ADHK mengalami pertumbuhan kontraksi pada tahun 2021-2022. Pada tahun 2019, PMTB mengalami pertumbuhan sebesar 1,69 persen, kemudian semakin melambat pada tahun 2020 sebesar 1,25 persen. Selanjutnya mengalami kontraksi sebesar 3,14 persen pada tahun 2021 dan 2,43 persen pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 meningkat sebesar 2,47 persen.

Pertumbuhan PMTB pada masing-masing komponen sangat bervariasi antar tahunnya. Sub komponen bangunan merupakan komponen dengan proporsi terbesar dalam pembentukan modal tetap, memiliki pertumbuhan yang cenderung searah

dengan pertumbuhan PMTB secara total, yakni mengalami perlambatan dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Pada tahun 2019, pertumbuhan sub komponen bangunan mencapai 4,53 persen hingga hanya mencapai 0,63 persen pada tahun 2021. Pada tahun 2022 dan 2023 mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 1,26 persen dan 2,75 persen.

Pertumbuhan sub komponen non bangunan lebih berfluktuatif. Pertumbuhan pada tahun 2019 mengalami kontraksi sebesar 8,42 persen. Pada tahun 2020, mampu mencapai pertumbuhan sebesar 5,25 persen. Pertumbuhan ini disumbang oleh pengadaan pemerintah berupa alat-alat kesehatan, peralatan pendukung pelayanan kesehatan hingga peningkatan fasilitas kesehatan untuk mengatasi pandemi Covid-19. Namun, pada tahun 2021 dan 2022 dimana kasus Covid-19 sudah mulai berkurang, pertumbuhan sub komponen non bangunan mengalami kontraksi masing-masing sebesar 17,76 persen dan 19,94 persen. Sedangkan, pada tahun 2023 mampu tumbuh kembali sebesar 0,82 persen.

3.6 PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk "*persediaan*" berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud di sini bisa berarti penambahan (positif) dan atau pengurangan (negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda, positif atau negatif (selain komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun (konsep stok).

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis secara rinci,

perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih lanjut. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah bahwa proporsi dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

Tabel 3.13
Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori
Provinsi Sumatera Selatan, 2019–2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori (miliar rupiah)					
a. ADHB	-731,37	-1.972,33	380,65	-2,48	2,51
b. ADHK 2010	-319,38	-1.331,43	54,85	-108,83	10,21
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	-0,16	-0,43	0,08	0,00	0,00

Catatan: * Angka sementara

** Angka sangat sementara

3.7 PERKEMBANGAN NET EKSPOR BARANG DAN JASA

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “persediaan” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produk.

I. Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik, tetapi dikonsumsi oleh pihak luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya termasuk pula dalam ekspor.

Tabel 3.14
Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri
Provinsi Sumatera Selatan, 2019–2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Ekspor LN (miliar rupiah)					
a. ADHB	63.322,31	54.267,33	81.916,58	125.095,83	105.288,50
b. ADHK 2010	59.085,55	51.975,30	74.587,31	105.594,25	100.804,13
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)					
	13,97	11,94	16,59	21,20	16,74
Struktur Ekspor LN					
a. Barang (miliar rupiah)	62.070,90	53.896,34	81.859,13	125.065,14	105.256,04
(%)	98,02	99,32	99,93	99,98	99,97
b. Jasa (miliar rupiah)	1.251,41	371,00	57,45	30,70	32,46
(%)	1,98	0,68	0,07	0,02	0,03
Total Ekspor LN (miliar rupiah)	63.322,31	54.267,33	81.916,58	125.095,83	105.288,50
(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan (%)					
a. Barang	- 2,26	- 11,12	44,15	41,62	- 4,54
b. Jasa	2,93	- 71,24	- 84,51	- 46,17	4,23
Total Ekspor LN	- 2,18	- 12,03	43,51	41,57	- 4,54

Catatan: * Angka sementara
 ** Angka sangat sementara

Menurut komposisinya, sebagian besar ekspor Sumatera Selatan berupa barang, berkisar 98 hingga 99 persen, sisanya adalah ekspor dalam bentuk jasa. Secara total, nilai ekspor Sumatera Selatan ke luar negeri berfluktuasi dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Tahun 2019, nilai ekspor mencapai 63,32 triliun rupiah kemudian mulai menurun pada tahun 2020 sebesar 54,27 triliun rupiah. Selanjutnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2021 mencapai 81,92 triliun rupiah dan terus meningkat pada tahun 2022 sebesar 125,09 triliun rupiah. Namun, kembali turun sebesar 105,29 triliun rupiah pada tahun 2023.

Secara ADHK, nilai ekspor luar negeri mengalami kontraksi pada tahun 2019 dan 2020 yang diakibatkan karena adanya penutupan sementara akses transportasi penumpang dan barang, baik transportasi darat, laut dan udara akibat pandemi Covid-19. Namun, pada tahun 2021 dengan telah berkurangnya kasus covid-19, membuat pemerintah mulai tidak memberlakukan lagi pembatasan akses transportasi sehingga ekspor luar negeri mulai tumbuh positif yaitu sebesar 43,51 persen dan 41,57 persen pada tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2023, kembali mengalami kontraksi sebesar 4,54 persen.

II. Perkembangan Impor Barang dan Jasa Luar Negeri

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori), di dalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi Sumatera Selatan, sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha.

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongan-nya bisa berbeda dengan ekspor.

Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor menunjukkan semakin kuatnya ketergantungan Sumatera Selatan terhadap ekonomi atau produk negara lain. Pada tahun 2017 ketergantungan dari produk impor menurun hingga 43 persen dan tahun 2018 kembali naik hingga 56 persen. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Sumatera Selatan di luar negeri baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa).

Tabel 3.15
Perkembangan Impor Luar Negeri Barang dan
Jasa Provinsi Sumatera Selatan, 2019–2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Impor LN (miliar rupiah)					
a. ADHB	14.836,97	15.934,07	13.839,36	13.515,09	17.710,16
b. ADHK 2010	10.038,85	11.905,17	10.289,57	9.857,99	12.465,62
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)					
	3,27	3,51	2,80	2,29	2,82
Struktur Impor LN					
a. Barang (miliar rupiah)	8.263,34	14.045,53	13.554,27	13.333,44	17.443,68
(%)	55,69	88,15	97,94	98,66	98,50
b. Jasa (miliar rupiah)	6.573,63	1.888,54	285,09	181,64	266,48
(%)	44,31	11,85	2,06	1,34	1,50
Total Impor LN (miliar rupiah)	14.836,97	15.934,07	13.839,36	13.515,09	17.710,16
(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan (%)					
a. Barang	- 29,40	79,14	- 5,45	- 3,58	26,25
b. Jasa	23,90	- 70,02	- 84,56	- 37,24	43,44
Total Impor LN	- 14,46	18,59	- 13,57	- 4,19	26,45

Catatan: * Angka sementara
 ** Angka sangat sementara

Tabel di atas menunjukkan bahwa pola perkembangan impor Sumatera Selatan pada periode tahun 2019 sampai dengan 2023 cukup berfluktuasi (baik ADHB maupun ADHK 2010). Secara riil nilai impor mengalami kontraksi pada tahun 2019 sebesar 14,46 persen namun kembali mengalami pertumbuhan sebesar 18,59 persen. Hal ini disebabkan karena adanya impor barang untuk menunjang program kegiatan dalam mengatasi pandemi Covid-19. Tahun 2021 dan 2022, impor luar negeri kembali mengalami kontraksi, masing-masing sebesar 13,57 persen dan 4,19 persen. Namun tumbuh signifikan pada tahun 2023 sebesar 26,45 persen.

Menurut komposisinya, sebagian besar produk impor berbentuk barang yang memiliki porsi sekitar 55-98 persen, sedangkan sisanya dalam bentuk impor jasa.

III. Perkembangan Net Ekspor Antar Daerah

Net ekspor antar daerah didefinisikan sebagai ekspor antar daerah dikurangi impor antar daerah. Berbeda dengan penghitungan ekspor-impor barang dan jasa luar negeri pada penghitungan ekspor-impor antar daerah tidak tersedia sumber data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Sumber data yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi namun tidak diketahui berapa nilai uang yang terjadi dalam transaksi tersebut. Keberadaan data dengan kondisi seperti ini menyebabkan penghitungan ekspor-impor antar provinsi menjadikan komponen ini (dalam series PDRB adh Konstan 2010) diperlakukan sebagai item penyeimbang (residual), yakni perbedaan antara total PDRB menurut pengeluaran dengan total PDRB menurut lapangan usaha.

Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu: ekspor antar daerah dan impor antar daerah. Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor antar daerah juga hasilnya dapat memiliki 2 (dua) angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda “*positif*” berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar dari pada impor antar daerah, demikian pula sebaliknya.

Pada saat ini untuk memisahkan net ekspor antar daerah menjadi nilai ekspor antar daerah dan nilai impor antar daerah dilakukan dengan metode tidak langsung yaitu dengan metode *Cross Hauling*. Metode ini bekerja dengan memanfaatkan sifat keseimbangan permintaan (*demand*) dan penyediaan (*supply*) setiap komoditas di suatu perekonomian. Penghitung ekspor impor dengan metode *Cross Hauling* diawali dengan metode *Commodity Balance*. Metode *commodity balance* adalah metode penghitungan ekspor-impor dengan memanfaatkan Tabel Input-Output “bayangan”. Dalam metode ini transaksi ekspor-impor dipandang sebagai item penyeimbang (*balancing item*) dalam keseimbangan *demand dan supply* suatu perekonomian.

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

BAB IV

PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB PROVINSI SUMATERA SELATAN MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2019-2023



4.1 PDRB (Nominal)

PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “*produktivitas*”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan. Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, maka disajikan data PDRB per kapita.

Tabel 4.1
Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita
Provinsi Sumatera Selatan, 2019–2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (miliar rupiah)					
a. ADHB	453.402,71	454.607,40	493.636,85	590.067,10	629.099,66
b. ADHK 2010	315.464,75	315.129,22	326.405,18	343.459,88	360.911,01
PDRB per kapita (ribu rupiah)					
a. ADHB	53.359,10	53.842,74	57.744,67	68.237,45	71.950,37
b. ADHK 2010	37.125,75	37.323,24	38.182,24	39.718,92	41.277,53
Pertumbuhan PDRB per kapita ADHK 2010					
	4,11	0,53	2,30	4,02	3,92
Jumlah penduduk (jiwa)	8.497.196	8.443.244	8.548.613	8.647.262	8.743.522
Pertumbuhan	1,52	-0,63	1,25	1,15	1,11

Catatan: * Angka sementara
** Angka sangat sementara

PDRB per kapita Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Sumatera Selatan rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai per-kapita di masing-masing tahun tersebut.

Sementara itu pertumbuhan per kapita secara “riil” mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, pertumbuhan per kapita sebesar 4,11 persen. Namun mengalami perlambatan pada tahun 2020 sebesar 0,53 persen dan kembali mengalami peningkatan sebesar 2,30 persen di tahun 2021 dan 4,02 persen pada tahun 2022. Sayangnya, pada tahun 2023 pertumbuhan perkapita kembali mengalami perlambatan sebesar 3,92 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti pula oleh penambahan jumlah penduduk, yang meningkat rata-rata 1,26 persen setiap tahunnya, kecuali tahun 2020. Dengan demikian maka pertumbuhan per kapita tersebut tidak saja terjadi secara “riil” tetapi juga terjadi secara kualitas.

4.2 PERBANDINGAN PENGGUNAAN PDRB UNTUK KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP EKSPOR

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara produk yang dikonsumsi rumah tangga di wilayah domestik dengan produk yang diekspor. Selama ini konsumsi rumah tangga mempunyai peranan yang sangat dominan dalam penggunaan PDRB Sumatera Selatan (sekitar 58 sampai 66 persen), yang artinya bahwa seluruh produk yang dihasilkan di wilayah Sumatera Selatan sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Namun di dalamnya termasuk pula sebagian produk yang berasal dari impor.

Data di bawah menunjukkan bahwa pada tahun 2019, produk yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga lebih dari 4 kali produk yang diekspor. Hal ini berarti bahwa sebagian besar penyediaan (*supply*) domestik diserap untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir rumah tangga. Penurunan rasio pada tahun 2021 dan 2022 lebih disebabkan karena peningkatan nilai ekspor dan konsumsi rumah tangga juga meningkat. Secara implisit data tersebut menjelaskan, bahwa nilai konsumsi akhir rumah tangga semakin meningkat dan nilai ekspor pun semakin meningkat. Peningkatan dan penurunan tersebut disebabkan oleh perubahan volume maupun harga. Selain itu, perkembangan ekspor dari tahun 2019 ke tahun 2023 disebabkan oleh adanya peningkatan pertumbuhan ekspor untuk memenuhi konsumsi akhir rumah

tangga.

Tabel 4.2
Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir
Rumah Tangga terhadap Ekspor, 2019–2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi RT (ADHB) (miliar rupiah)	296.904,98	295.605,35	308.635,30	347.794,20	381.441,02
Ekspor LN (ADHB) (miliar rupiah)	63.322,31	54.267,33	81.916,58	125.095,83	105.288,50
Perbandingan Konsumsi RT terhadap Ekspor LN	4,69	5,45	3,77	2,78	3,62

Catatan: * Angka sementara

** Angka sangat sementara

4.3 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap).

Tabel 4.3
Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB, 2019–2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (miliar rupiah)	296.904,98	295.605,35	308.635,30	347.794,20	381.441,02
Total PMTB (ADHB) (miliar rupiah)	160.152,72	162.651,12	165.435,57	182.083,24	191.036,81
Perbandingan Konsumsi RT terhadap PMTB	1,85	1,82	1,87	1,91	2,00

Catatan: * Angka sementara

** Angka sangat sementara

Seperti halnya terhadap ekspor luar negeri, rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB cenderung stabil, dari sebesar 1,85 persen pada tahun 2019 menjadi 2 persen pada tahun 2023. Hal ini terjadi karena kenaikan nilai investasi dan konsumsi akhir rumah tangga mengalami percepatan yang relatif sama.

4.4 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Tabel 4.4
Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB
Provinsi Sumatera Selatan, 2019–2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (miliar rupiah)					
a. Rumah Tangga	296.904,98	295.605,35	308.635,30	347.794,20	381.441,02
b. LNPRT	7.240,99	6.748,58	7.130,46	8.067,44	8.968,84
c. Pemerintah	36.686,87	31.995,00	34.055,60	34.163,92	37.028,28
PDRB (ADHB) (miliar rupiah)	453.402,71	454.607,40	493.636,85	590.067,10	629.099,66
Proporsi	75,17	73,55	70,87	66,10	67,94

Catatan: * Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sebagian besar barang dan jasa yang berada di wilayah domestik digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (lebih dari 65 persen). Dalam hal ini, produk yang tidak digunakan menjadi konsumsi akhir (PMTB atau ekspor) memiliki peran yang relatif kecil.

4.5 PERBANDINGAN EKSPOR TERHADAP PMTB

Ekspor merupakan produk yang tidak dikonsumsi di wilayah domestik, tetapi diperdagangkan ke luar negeri/provinsi. Untuk menghasilkan produk yang diekspor kemungkinan besar menggunakan kapital (PMTB). Sementara di sisi lain sebagian barang yang diekspor bisa pula berupa barang kapital. Rasio ekspor terhadap PMTB dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan antara nilai produk ekspor dengan nilai produk yang menjadi kapital (PMTB).

Tabel 4.5
Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB), 2019–2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ekspor LN (ADHB) (miliar rupiah)	63.322,31	54.267,33	81.916,58	125.095,83	105.288,50
Total PMTB (ADHB) (miliar rupiah)	160.152,72	162.651,12	165.435,57	182.083,24	191.036,81
Rasio Ekspor terhadap PMTB (%)	39,54	33,36	49,52	68,70	55,11

Catatan: * Angka sementara
** Angka sangat sementara

Pada periode 2019-2023, ekspor Sumatera Selatan ke luar negeri mempunyai nilai yang lebih rendah dari PMTB. Untuk menghasilkan seluruh produk domestik (termasuk ekspor) disyaratkan tersedianya sejumlah kapital (yang di dalamnya termasuk pula kapital impor). Dalam kurun waktu 2019 hingga 2020, rasio ekspor terhadap PMTB mengalami penurunan masing-masing sebesar 39,54 persen dan 33,36 persen. Namun pada tahun 2021 dan 2022, rasio ekspor terhadap PMTB mengalami peningkatan signifikan sebesar 49,52 persen dan 68,70 persen. Kenaikan rasio selama periode 2 tahun tersebut di antaranya disebabkan oleh kenaikan ekspor yang relatif lebih pesat dibandingkan dengan kenaikan PMTB. Sedangkan, pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan sebesar 55,11 persen.

4.6 PERBANDINGAN PDRB TERHADAP IMPOR

Rasio ini memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang

dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB) dengan produk yang berasal dari impor. Selain itu data tersebut menjelaskan tentang ketergantungan PDRB terhadap produk yang dihasilkan oleh negara/provinsi lain. Jika rasionya kecil berarti ketergantungan akan impor semakin tinggi, dan sebaliknya.

Rasio PDRB terhadap impor tahun 2019-2023 berkisar antara 2,78 (2019) sampai 4,18 (2023). Rasio ini menunjukkan bahwa sekitar sepertiga dari PDRB Provinsi Sumatera Selatan tergantung terhadap produk luar negeri dan luar provinsi Sumatera Selatan. Mulai tahun 2019-2023 PDRB Provinsi Sumatera Selatan mulai menunjukkan nilai positif yang terus meningkat yang artinya ketergantungan akan impor semakin tinggi di provinsi ini.

Tabel 4.6
Rasio PDRB terhadap Impor Provinsi Sumatera Selatan, 2019–2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHB) (miliar rupiah)	453.402,71	454.607,40	493.636,85	590.067,10	629.099,66
Total Impor (ADHB) (miliar rupiah)	163.191,63	141.719,87	135.183,14	158.142,52	150.503,10
Rasio PDRB terhadap Impor (%)	2,78	3,21	3,65	3,73	4,18

Catatan: * Angka sementara

** Angka sangat sementara

4.7 KESEIMBANGAN TOTAL PENYEDIAAN DAN TOTAL PERMINTAAN

Rasio ini dapat menunjukkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi suatu daerah oleh produk yang berasal dari impor. Ketergantungan (ketidakseimbangan) tersebut dapat dilihat melalui keseimbangan antara total penyediaan (*supply*) dengan total permintaan akhir (*demand*).

Dari tabel dibawah ini, dapat dilihat bahwa untuk memenuhi permintaan akhir regional Sumatera Selatan, sebagian produk masih harus didatangkan dari luar negeri dan luar provinsi, dengan rentang 19-32 persen. Dengan kata lain, kebutuhan masyarakat baru bisa dipenuhi sekitar 68-81 persen dari hasil produksi regional Sumatera Selatan. Dalam kurun waktu tersebut, tendensi permintaan (akhir)

masyarakat terus meningkat dari tahun 2019 hingga tahun 2023, yaitu sebesar 616,59 triliun rupiah (2019) menjadi sebesar 779,60 triliun rupiah (2023). Pada tahun 2019, permintaan (akhir) masyarakat mengalami penurunan menjadi sebesar 596,33 triliun rupiah. Namun, pada tahun 2021 hingga tahun 2023 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 779,60 triliun rupiah.

Di sisi lain, “penyediaan” produk barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh ekonomi regional Sumatera Selatan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2019, penyediaan barang dan jasa sebesar 453,40 triliun rupiah, meningkat menjadi 454,61 triliun rupiah (2020); 493,64 triliun rupiah (2021); 590,07 triliun rupiah (2022) dan mencapai 629,10 triliun rupiah pada tahun 2023. Karena produk di dalam regional Sumatera Selatan tidak mampu mencukupi seluruh kebutuhan permintaan, maka berbagai produk barang dan jasa diimpor, baik dari luar negeri maupun dari luar provinsi dengan nilai masing-masing tahun sebesar 163,19 triliun rupiah (2019); 141,72 triliun rupiah (2020); 135,18 triliun rupiah (2021); 158,14 triliun rupiah (2022) dan 150,50 triliun rupiah (2023).

Tabel 4.7
Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan
Provinsi Sumatera Selatan, 2019–2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Penyediaan					
PDRB (ADHB)					
(miliar rupiah)	453.402,71	454.607,40	493.636,85	590.067,10	629.099,66
(%)	73,53	76,23	78,50	78,86	80,69
Total nilai Impor ADHB					
(miliar rupiah)	163.191,63	141.719,87	135.183,14	158.142,52	150.503,10
(%)	26,47	23,77	21,50	21,14	19,31
Total Permintaan					
Nilai (Miliar Rp)	616.594,34	596.327,27	628.819,99	748.209,62	779.602,76
(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan: * Angka sementara

** Angka sangat sementara

4.8 NERACA PERDAGANGAN (*TRADE BALANCE*)

Transaksi valuta yang berasal dari perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar negeri (non-residen) dan luar provinsi dapat dilihat melalui neraca perdagangan. Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut sebagai “*Ekspor Neto*”, apabila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka terjadi surplus, dan sebaliknya yang terjadi adalah defisit. Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi *surplus*, maka terjadi aliran valuta masuk, sebaliknya kalau posisinya defisit maka terjadi aliran valuta keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah di antaranya ditentukan oleh proses tersebut.

Selain gambaran posisi neraca perdagangan, dapat juga dilihat perbandingan (rasio) antara nilai ekspor terhadap impor, meskipun hanya berlaku secara total. Namun rasio tersebut tidak dapat merefleksikan perbandingan menurut jenis komoditas, harga maupun kuantum. Apabila rasio lebih besar dari 1 (satu) maka nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, sebaliknya apabila rasio kurang dari 1 (satu) berarti nilai impor lebih tinggi dari pada nilai ekspor. Besar kecilnya ekspor atau impor suatu negara sangat tergantung kepada kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakatnya.

Tabel 4.8
Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Luar Negeri,
Provinsi Sumatera Selatan, 2019–2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor (ADHB) (miliar rupiah)	63.322,31	54.267,33	81.916,58	125.095,83	105.288,50
Nilai Impor (ADHB) (miliar rupiah)	14.836,97	15.934,07	13.839,36	13.515,09	17.710,16
Net ekspor (X – M) (miliar rupiah)	48.485,33	38.333,26	68.077,21	111.580,75	87.578,34
Rasio Ekspor terhadap Impor	4,27	3,41	5,92	9,26	5,95

Catatan: * Angka sementara

** Angka sangat sementara

Selama periode 2018–2022, posisi perdagangan barang dan jasa provinsi Sumatera Selatan dengan luar negeri, selalu menunjukkan nilai positif. Hal ini

menunjukkan neraca perdagangan barang dan jasa provinsi Sumatera Selatan selalu dalam posisi *surplus*. Nilai ekspor yang lebih besar dari impor menyebabkan adanya aliran devisa masuk, yang dalam konteks lain disebut sebagai “*tabungan luar negeri*”. *Surplus* perdagangan luar negeri di Provinsi Sumatera Selatan yang terjadi antara tahun 2019 sampai dengan 2023 tercatat masing-masing sebesar 48,49 triliun rupiah; 38,33 triliun rupiah; 68,08 triliun rupiah; 111,58 triliun rupiah dan 87,58 triliun rupiah. Sementara rasio ekspor terhadap impor cenderung fluktuatif dari tahun 2019-2021. Rasio tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 9,26 dan rasio terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 3,41 persen.

Tabel 4.9
Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Antar Provinsi,
Provinsi Sumatera Selatan, 2019–2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor (ADHB) (miliar rupiah)	53.017,84	47.032,22	31.265,83	51.007,47	55.836,80
Nilai Impor (ADHB) (miliar rupiah)	148.354,65	125.785,81	121.343,77	144.627,43	132.792,94
Net ekspor (X – M) (miliar rupiah)	-95.336,81	-78.753,58	-90.077,94	-93.619,96	-76.956,15
Rasio Ekspor terhadap Impor	0,36	0,37	0,26	0,35	0,42

Catatan: * Angka sementara
** Angka sangat sementara

Sebaliknya, selama periode 2019–2023, posisi perdagangan barang dan jasa provinsi Sumatera Selatan dengan provinsi lainnya dalam negeri, selalu menunjukkan nilai negatif. Hal ini menunjukkan neraca perdagangan barang dan jasa provinsi Sumatera Selatan selalu dalam posisi defisit. Nilai impor yang lebih besar dari ekspor menyebabkan adanya aliran devisa keluar. Hal ini karena adanya permintaan yang cukup besar dari dalam provinsi tetapi barang dan jasanya masih banyak yang didatangkan dari luar provinsi. Defisit perdagangan antar Provinsi di Sumatera Selatan yang terjadi antara tahun 2019 sampai dengan 2023 berada pada kisaran 78,75 triliun rupiah hingga 95,34 triliun rupiah. Sementara rasio ekspor terhadap impor naik dari 0,36 pada tahun 2019 menjadi 0,42 pada tahun 2023.

4.9 RASIO PERDAGANGAN INTERNASIONAL (RPI)

Rasio ini menunjukkan perbandingan aktivitas perdagangan internasional dari suatu wilayah apakah didominasi oleh ekspor atau impor luar negeri (LN). Formulasinya diperoleh dengan menghitung selisih antara ekspor LN dan impor LN dibagi dengan jumlah ekspor LN dan impor LN. Koefisien RPI berkisar antara -1 dan +1 ($-1 < \text{RPI} < +1$). Jika RPI berkisar antara minus 1 maka perdagangan internasional didominasi oleh impor sedangkan apabila berkisar positif 1 maka perdagangan internasional didominasi oleh transaksi ekspor.

Data pada tabel di bawah menunjukkan bahwa pada periode tahun 2019-2023, posisi ekspor selalu lebih tinggi dari impor. Rasio perdagangan internasional dalam kurun waktu 2019-2023 selalu berkisar positif 1. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perdagangan internasional Provinsi Sumatera Selatan selalu didominasi oleh kegiatan ekspor.

Tabel 4.10

Rasio Perdagangan Internasional Provinsi Sumatera Selatan, 2019–2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor LN ADHB (X) (miliar rupiah)	63.322,31	54.267,33	81.916,58	125.095,83	105.288,50
Nilai Impor LN ADHB (M) (miliar rupiah)	14.836,97	15.934,07	13.839,36	13.515,09	17.710,16
(X-M) (miliar rupiah)	48.485,33	38.333,26	68.077,21	111.580,75	87.578,34
(X+M) (miliar rupiah)	78.159,28	70.201,40	95.755,94	138.610,92	122.998,65
RPI	0,62	0,55	0,71	0,80	0,71

Catatan: * Angka sementara

** Angka sangat sementara

4.10 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

"ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*). ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses

produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah".

Dengan menggunakan rasio ini maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Formula :

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

dengan : I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

Data di bawah menunjukkan besaran ICOR cenderung mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2019, ICOR sebesar 6,67, kemudian meningkat menjadi 9,84 di tahun 2021. Namun pada tahun 2022 hingga tahun 2023 kembali menurun masing-masing menjadi sebesar 6,35 dan 6,36. Ini artinya penambahan kapital tidak selalu diiringi dengan penambahan sejumlah output (keluaran).

Tabel 4.11
Incremental Capital Output Ratio Provinsi Sumatera Selatan, 2019–2023

Uraian	2019	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PDRB (ADHK 2010) (miliar rupiah)	315.464,75	326.405,18	343.459,88	360.911,01
Perubahan (miliar rupiah)	16.980,68	11.275,97	17.054,69	17.451,13
PMTB (ADHK 2010) (miliar rupiah)	113.186,34	111.007,10	108.306,92	110.986,58
ICOR	6,67	9,84	6,35	6,36

Catatan: * Angka sementara

** Angka sangat sementara

Penghitungan ICOR tahun 2020 tidak dilakukan karena ada faktor pandemi Covid-19 yang mengakibatkan nilai ICOR tidak dapat dijadikan sebagai dasar analisis sebagaimana terjadi pada kondisi normal.

BAB V

PENUTUP

<https://sumsel.bps.go.id>



1. PDRB menurut penggunaan tahun 2019 hingga 2023 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi provinsi Sumatera Selatan pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi penggunaan akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir baik untuk tujuan konsumsi akhir investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Tiga kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT dan pemerintah.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi investasi dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2019 hingga 2023 sehingga mudah dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio unit, dan sebagainya) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut penggunaan dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan *disposable*, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana.

5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar negeri (*external account*) secara agregat telah disajikan di sini seperti ekspor dan impor dan transfer berjalan (*current tranfer*) neto. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan terhadap ekonomi negara lain (*rest of the world*).

<https://sumsel.bps.go.id>

LAMPIRAN

<https://sumsel.bps.go.id>



Lampiran 1

**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Provinsi Sumatera Selatan Menurut Pengeluaran
(miliar rupiah), 2019–2023**

Komponen Konsumsi	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	296.904,98	295.605,35	308.635,30	347.794,20	381.441,02
a. Makanan dan Minuman, Selain Restoran	168.768,25	170.165,15	177.964,56	203.130,57	227.434,82
b. Pakaian, Alas Kaki dan Jasa Perawatannya	11.910,85	11.949,72	12.618,19	14.379,14	15.233,00
c. Perumahan dan Perlengkapan Rumahtangga	29.800,27	29.782,69	31.091,21	34.770,34	36.471,77
d. Kesehatan dan Pendidikan	20.833,95	21.712,11	22.763,56	24.552,86	25.857,73
e. Transportasi dan Komunikasi	39.050,17	36.498,13	37.114,76	41.688,01	45.184,89
f. Restoran dan Hotel	16.304,10	14.655,71	15.449,96	17.001,80	18.174,19
g. Lainnya	10.237,38	10.841,85	11.633,06	12.271,48	13.084,61
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	7.240,99	6.748,58	7.130,46	8.067,44	8.968,84
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	36.686,87	31.995,00	34.055,60	34.163,92	37.028,28
a. Konsumsi Kolektif	27.625,16	22.056,66	22.502,44	23.209,65	26.248,81
b. Konsumsi Individu	9.061,72	9.938,34	11.553,16	10.954,27	10.779,48
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	160.152,72	162.651,12	165.435,57	182.083,24	191.036,81
a. Bangunan	133.549,44	134.448,63	141.147,43	161.275,05	169.152,17
b. Non Bangunan	26.603,27	28.202,49	24.288,14	20.808,19	21.884,64
5. Perubahan Inventori	-731,37	-1.972,33	380,65	-2,48	2,51
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-46.851,48	-40.420,32	-22.000,73	17.960,79	10.622,20
a. Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri	63.322,31	54.267,33	81.916,58	125.095,83	105.288,50
b. Impor Barang dan Jasa Luar Negeri	14.836,97	15.934,07	13.839,36	13.515,09	17.710,16
c. Net Ekspor Barang dan Jasa Antar Daerah	-95.336,81	-78.753,58	-90.077,94	-93.619,96	-76.956,15
PDRB	453.402,71	454.607,40	493.636,85	590.067,10	629.099,66

Catatan: * Angka sementara

** Angka sangat sementara

Lampiran 2

**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga
Konstan Provinsi Sumatera Selatan Menurut Pengeluaran
(miliar rupiah), 2019–2023**

Komponen Konsumsi	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	190.641,45	186.943,08	190.560,72	201.978,44	212.618,53
a. Makanan dan Minuman, Selain Restoran	106.170,96	104.665,27	106.020,80	112.947,16	120.788,02
b. Pakaian, Alas Kaki dan Jasa Perawatannya	8.094,13	8.039,09	8.087,60	8.690,62	8.814,37
c. Perumahan dan Perlengkapan Rumahtangga	18.728,59	18.612,49	19.110,81	20.252,35	20.785,06
d. Kesehatan dan Pendidikan	13.380,39	13.743,58	14.261,91	14.622,16	14.928,90
e. Transportasi dan Komunikasi	26.677,42	25.146,65	25.469,71	27.062,69	28.229,81
f. Restoran dan Hotel	10.276,91	9.241,56	9.713,42	10.453,24	10.878,59
g. Lainnya	7.313,05	7.494,43	7.896,48	7.950,24	8.193,78
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	5.009,23	4.710,91	4.806,55	5.067,13	5.410,88
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	22.801,46	19.869,06	20.444,95	20.691,85	21.746,26
a. Konsumsi Kolektif	16.332,96	12.872,51	12.507,47	12.549,23	13.580,41
b. Konsumsi Individu	6.468,50	6.996,55	7.937,47	8.142,63	8.165,85
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	113.186,34	114.605,19	111.007,10	108.306,92	110.986,58
a. Bangunan	90.863,58	91.110,82	91.686,44	92.838,70	95.390,99
b. Non Bangunan	22.322,75	23.494,37	19.320,66	15.468,22	15.595,60
5. Perubahan Inventori	- 319,38	-1 331,43	54,85	- 108,83	10,21
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-15.854,35	-9.667,59	-468,99	7.524,36	10.138,55
a. Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri	59.085,55	51.975,30	74.587,31	105.594,25	100.804,13
b. Impor Barang dan Jasa Luar Negeri	10.038,85	11.905,17	10.289,57	9.857,99	12.465,62
c. Net Ekspor Barang dan Jasa Antar Daerah	-64.901,05	-49.737,73	-64.766,73	-88.211,90	-78.199,95
PDRB	315.464,75	315.129,22	326.405,18	343.459,88	360.911,01

Catatan: * Angka sementara

** Angka sangat sementara

Lampiran 3

**Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Sumatera Selatan
Menurut Pengeluaran (persen), 2019–2023**

Komponen Konsumsi	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	65,48	65,02	62,52	58,94	60,63
a. Makanan dan Minuman, Selain Restoran	56,41	56,84	57,56	57,66	58,41
b. Pakaian, Alas Kaki dan Jasa Perawatannya	4,10	4,01	4,04	4,09	4,13
c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah tangga	10,25	10,04	10,08	10,07	10,00
d. Kesehatan dan Pendidikan	7,06	7,02	7,34	7,38	7,06
e. Transportasi dan Komunikasi	13,11	13,15	12,35	12,03	11,99
f. Restoran dan Hotel	5,58	5,49	4,96	5,01	4,89
g. Lainnya	3,49	3,45	3,67	3,77	3,53
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,60	1,48	1,44	1,37	1,43
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8,09	7,04	6,90	5,79	5,89
a. Konsumsi Kolektif	6,09	4,85	4,56	3,93	4,17
b. Konsumsi Individu	2,00	2,19	2,34	1,86	1,71
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	35,32	35,78	33,51	30,86	30,37
a. Bangunan	29,45	29,57	28,59	27,33	26,89
b. Non Bangunan	5,87	6,20	4,92	3,53	3,48
5. Perubahan Inventori	-0,16	-0,43	0,08	-0,00	0,00
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-10,33	-8,89	-4,46	3,04	1,69
a. Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri	13,97	11,94	16,59	21,20	16,74
b. Impor Barang dan Jasa Luar Negeri	3,27	3,51	2,80	2,29	2,82
c. Net Ekspor Barang dan Jasa Antar Daerah	-21,03	-17,32	-18,25	-15,87	-12,23
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan: * Angka sementara
 ** Angka sangat sementara

Lampiran 4

**Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Sumatera
Selatan Menurut Pengeluaran (persen), 2019–2023**

Komponen Konsumsi	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,94	-1,94	1,94	5,99	5,27
a. Makanan dan Minuman, Selain Restoran	4,58	-1,42	1,30	6,53	6,94
b. Pakaian, Alas Kaki dan Jasa Perawatannya	2,48	-0,68	0,60	7,46	1,42
c. Perumahan dan Perlengkapan Rumahtangga	2,47	-0,62	2,68	5,97	2,63
d. Kesehatan dan Pendidikan	3,35	2,71	3,77	2,53	2,10
e. Transportasi dan Komunikasi	3,90	-5,74	1,28	6,25	4,31
f. Restoran dan Hotel	2,77	-10,07	5,11	7,62	4,07
g. Lainnya	2,92	2,48	5,36	0,68	3,06
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	9,78	-5,96	2,03	5,42	6,78
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5,54	-12,86	2,90	1,21	5,10
a. Konsumsi Kolektif	12,96	-21,19	-2,84	0,33	8,22
b. Konsumsi Individu	-9,47	8,16	13,45	2,58	0,29
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1,69	1,25	-3,14	-2,43	2,47
a. Bangunan	4,92	4,53	0,27	0,63	1,26
b. Non Bangunan	-0,25	-8,42	5,25	-17,76	-19,94
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
a. Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri	- 2,18	- 12,03	43,51	41,57	- 4,54
b. Impor Barang dan Jasa Luar Negeri	-14,46	18,59	-13,57	-4,19	26,45
c. Net Ekspor Barang dan Jasa Antar Daerah	-8,39	-23,36	30,22	36,20	-11,35
PDRB	5,69	-0,11	3,58	5,23	5,08

Catatan: * Angka sementara

** Angka sangat sementara

**Lampiran 5 Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100)
Provinsi Sumatera Selatan Menurut Pengeluaran (persen), 2019–2023**

Komponen Konsumsi	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	155,74	158,13	161,96	172,19	179,40
a. Makanan dan Minuman, Selain Restoran	158,96	162,58	167,86	179,85	188,29
b. Pakaian, Alas Kaki dan Jasa Perawatannya	147,15	148,65	156,02	165,46	172,82
c. Perumahan dan Perlengkapan Rumahtangga	159,12	160,01	162,69	171,69	175,47
d. Kesehatan dan Pendidikan	155,71	157,98	159,61	167,92	173,21
e. Transportasi dan Komunikasi	146,38	145,14	145,72	154,04	160,06
f. Restoran dan Hotel	158,65	158,58	159,06	162,65	167,06
g. Lainnya	139,99	144,67	147,32	154,35	159,69
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	144,55	143,25	148,35	159,21	165,76
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	160,90	161,03	166,57	165,11	170,27
a. Konsumsi Kolektif	169,14	171,35	179,91	184,95	193,28
b. Konsumsi Individu	140,09	142,05	145,55	134,53	132,01
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	141,49	141,92	149,03	168,12	172,13
a. Bangunan	146,98	147,57	153,95	173,72	177,33
b. Non Bangunan	119,18	120,04	125,71	134,52	140,33
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
a. Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri	107,17	104,41	109,83	118,47	104,45
b. Impor Barang dan Jasa Luar Negeri	147,80	133,84	134,50	137,10	142,07
c. Net Ekspor Barang dan Jasa Antar Daerah	146,90	158,34	139,08	106,13	98,41
PDRB	143,73	144,26	151,23	171,80	174,31

Catatan: * Angka sementara
** Angka sangat sementara

Lampiran 6

Laju Pertumbuhan Indeks Implisit
Produk Domestik Regional Bruto (2010=100)
Provinsi Sumatera Selatan Menurut Pengeluaran (persen),
2019–2023

Komponen Konsumsi	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2,84	1,53	2,43	6,32	4,19
a. Makanan dan Minuman, Selain Restoran	3,16	3,00	2,28	3,25	7,14
b. Pakaian, Alas Kaki dan Jasa Perawatannya	2,81	2,12	1,01	4,96	6,05
c. Perumahan dan Perlengkapan Rumahtangga	3,34	2,10	0,56	1,67	5,53
d. Kesehatan dan Pendidikan	3,44	2,75	1,46	1,03	5,20
e. Transportasi dan Komunikasi	3,30	3,23	-0,85	0,40	5,71
f. Restoran dan Hotel	6,32	2,39	-0,04	0,30	2,26
g. Lainnya	3,60	2,46	3,34	1,83	4,77
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3,74	-0,90	3,56	7,32	4,11
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,09	0,08	3,44	-0,88	3,13
a. Konsumsi Kolektif	2,37	6,58	1,31	5,00	2,80
b. Konsumsi Individu	-2,22	5,22	1,40	2,47	-7,57
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	-0,09	0,30	5,01	12,81	2,38
a. Bangunan	4,16	-1,68	0,40	4,32	12,84
b. Non Bangunan	-1,20	4,93	0,72	4,72	7,01
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
a. Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri	-5,22	-2,58	5,19	7,87	-11,83
b. Impor Barang dan Jasa Luar Negeri	1,05	-9,44	0,49	1,93	3,63
c. Net Ekspor Barang dan Jasa Antar Daerah	-0,88	7,79	-12,16	-23,69	-7,28
PDRB	2,29	0,37	4,83	13,60	1,46

Catatan: * Angka sementara

** Angka sangat sementara

DAFTAR PUSTAKA

<https://sumsel.bps.go.id>



DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik, Tabel Input Output Indonesia, berbagai seri, Jakarta.

_____, Incremental Capital Output Ratio Sektor Industri, 1980-1990. Jakarta.

_____, Pendapatan Nasional Indonesia, berbagai seri, Jakarta.

_____, Statistik Industri, berbagai seri, Jakarta.

_____, Statistik Listrik, Gas dan Air, berbagai seri, Jakarta.

_____, Statistik Pertambangan Migas, berbagai seri, Jakarta.

_____, Statistik Pertambangan Non Migas, berbagai seri, Jakarta.

_____, Statistik Konstruksi, berbagai seri, Jakarta.

_____, Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat, berbagai seri, Jakarta.

_____, Statistik Keuangan BUMN dan BUMD, 1997, Jakarta 2000.

_____, Profil Ekonomi Rumah tangga 1998, Jakarta 1999.

Frenken Jim, How To Measure Tangible Capital Stocks, Netherlands, 1992.

Host Poul, Madsen, Macroeconomic Accounts An Overview, Pamphlet Series.
No. 29. Washington DC. 1979.

Keuning. J. Steven, An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.

United Nations, A System of National Accounts, Studies in Methods, Series F No.2
Rev.3. New York, 1968.

_____, Input-Output Table and Analysis. Studies in Methods. Series F No. 14 Rev 1.
New York. 1973.

_____, Handbook of National Accounting for Production, Sources and Methods,
Series F No. 39, New York, 1986.

_____, Handbook of National Accounting, Public Sector Accounts, Studies Methods, Series F No. 50. New York, 1988.

_____, Link between Business Accounting and National Accounting, Public Sector Accounts, Studies Methods, Series F No. 76. New York, 2000.

Verbiest Piet, Investment Matrix, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.

Ward. Michael, The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries, Paris, 1976.

World Bank, System of National Accounts 1993, Bahan Kursus, Washington DC. 1993

<https://sumsel.bps.go.id>

ST2023

SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jalan Kapten Anwar Sastro No. 1131 Palembang

Telepon : (0711) 353174, Fax: (0711)353174

Email: bps1600@bps.go.id

ISSN 2503-1961



9 772503 196009